

Intisari

Pada tahun 2009-2018, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah berindikasi terdapat permasalahan dilihat dari belum optimalnya realisasi retribusi daerah yang sering mengalami fluktuasi. Realisasi retribusi daerah disebabkan oleh 2 faktor, yaitu disebabkan karena keberhasilan pemerintah dalam melampaui target yang ditetapkan dan ketidakmampuan pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara efektif dan efisien yang menyebabkan realisasi retribusi daerah belum optimal. Metode yang digunakan untuk mendeskripsikan hasil penelitian adalah analisis kondisi laporan keuangan daerah dan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) dalam merumuskan upaya-upaya yang dapat mengoptimalkan retribusi daerah.

Hasil penelitian menunjukkan kondisi laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah terbaik pada tahun 2013 dan penyebab belum optimalnya realisasi retribusi daerah pada tahun 2009-2018 adalah rendahnya realisasi retribusi daerah pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Adapun upaya yang diperkirakan dapat efektif dalam mengoptimalkan retribusi daerah adalah dengan sistem teknologi yang terintegrasi antara perencanaan, monitoring dan evaluasi pada Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.

Kata Kunci: retribusi daerah, anggaran, AHP

Abstract

In 2009-2018, the Bangka Tengah Government indicated that there were problems as seen from the not yet optimal realization of regional levies that often fluctuated. The realization of local charges is caused by 2 factors, namely due to the success of the government in exceeding the targets set and the inability of local governments to plan and implement budgets effectively and efficiently which causes the realization of regional charges not yet optimal. The method used to describe the research results is the analysis of the condition of regional financial reports and the Analytical Hierarchy Process (AHP) method in formulating efforts that can optimize local retribution.

The results showed that the condition of the financial statements of the Bangka Tengah Government was the best in 2013 and the cause of the sub-optimal realization of local levies in 2009-2018 was the low realization of local charges in several Regional Apparatus Organizations (OPD). Efforts that are thought to be effective in optimizing local user fees are a technology system that is integrated between planning, monitoring and evaluation in the Bangka Tengah Government.

Keywords: local retribution, budget, AHP